

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Jawa bagian tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta pada bagian selatan dibatasi lautan Indonesia, sedangkan di bagian timur laut, tenggara, barat dan barat laut dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yaitu kabupaten Klaten di sebelah timur laut, kabupaten Wonogiri di sebelah tenggara, kabupaten Purworejo di sebelah barat dan kabupaten Magelang di sebelah barat laut. Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara 7°.33' - 8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00' - 110°.50' Bujur Timur dan tercatat memiliki luas wilayah administrasi terkecil kedua di Republik Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta. Luas wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 3.185,80  $km^2$ , atau 0,17 persen dari seluruh wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

**Gambar 4.1 Peta Wilayah Administrasi  
Daerah Istimewa Yogyakarta**

Secara administratif, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota yaitu Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kota Yogyakarta. Berbeda dengan provinsi lain yang banyak mengalami pemekaran sejak

pemberlakuan kebijakan otonomi daerah, jumlah kabupaten, kota, kecamatan dan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengalami perubahan. Daerah yang memiliki luas administrasi terbesar adalah Kabupaten Gunung Kidul dengan luas  $1.485,4 \text{ km}^2$  atau 46,6 persen dari luas Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara Kota Yogyakarta menjadi daerah dengan luas wilayah terkecil yaitu sebesar  $32,5 \text{ km}^2$  atau 0,01 persen dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014**

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah ( $\text{km}^2$ )	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kelurahan	Status Desa/ Kelurahan	
				Perkotaan	Perdesaan
Kulon Progo	586,27	12	88	13	75
Bantul	506,85	17	75	47	28
Gunung Kidul	1.485,36	18	144	5	139
Sleman	574,82	17	86	59	27
Yogyakarta	32,50	14	45	45	-
<b>DIY</b>	<b>3.185,80</b>	<b>78</b>	<b>438</b>	<b>169</b>	<b>269</b>

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Karakteristik bentang alam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kombinasi antara daerah pesisir pantai, dataran rendah dan pegunungan atau perbukitan yang dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi. Pertama, satuan fisiografi Gunung Merapi yang berada pada ketinggian antara 80 m sampai 2.911 m di atas permukaan laut. Wilayah ini terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api serta bentang lahan vulkanik di wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Bantul. Bentang wilayah ini cukup subur sehingga sangat berpotensi untuk kegiatan budidaya komoditas pertanian terutama tanaman pangan semusim.

Kedua, satuan fisiografi Pegunungan Selatan dengan ketinggian 150 m sampai 700 m, wilayah ini menjadi bagian jalur Pegunungan Seribu yang terletak di wilayah Kabupaten Gunung Kidul dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul. Kawasan ini didominasi oleh

wilayah perbukitan batu kapur dan karst yang tandus dan kekurangan air permukaan sehingga kurang potensial untuk kegiatan budidaya komoditas pertanian semusim. Ketiga, satuan fisiografi Pegunungan Kulonprogo yang terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Kulonprogo. Kawasan ini menjadi bentang lahan dengan topografi wilayah berupa perbukitan sehingga cukup potensial untuk pengembangan komoditas perkebunan. Keempat, satuan fisiografi Dataran Rendah dengan ketinggian 0 – 80 m di atas permukaan laut. Kawasan ini membentang di bagian wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dari pesisir Kulonprogo sampai wilayah Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Kawasan ini sangat subur sehingga sangat berpotensi untuk kegiatan budidaya komoditas pertanian semusim.

## **2. Penduduk dan Tenaga Kerja**

Sensus Penduduk tahun 2010 mencatat jumlah penduduk yang tinggal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3.457.491 jiwa yang terdiri dari 49,4 persen laki-laki dan 50,6 persen perempuan. Jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta semakin bertambah setiap tahun dengan laju pertumbuhan yang berfluktuasi namun masih dapat dikendalikan. Hasil Sensus Penduduk tahun 1971 mencatat jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 2,5 juta jiwa dan meningkat menjadi 3,5 juta jiwa pada tahun 2010.

Pertumbuhan penduduk selama periode 1971 - 1980 sebesar 1,10 persen per tahun. Laju ini melambat 0,58 persen per tahun pada periode 1980 – 1990 dan 0,72 persen per tahun pada periode 1990 – 2000 sebagai dampak keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) dan program perbaikan taraf kesehatan masyarakat. Namun dalam sepuluh tahun terakhir yaitu pada tahun 2000 – 2010, laju pertumbuhan penduduk kembali meningkat menjadi 1,04 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk tercepat selama empat dekade terakhir terjadi di Kabupaten Sleman dan Bantul. Pada periode 2000 – 2010, kedua daerah ini memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,9 persen dan 1,6 persen per tahun. Sementara Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan penduduk negatif sebesar 0,2 persen.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasil Sensus Penduduk 1971 - 2010**

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan per Tahun (%)			
	1971	1980	1990	2000	2010	1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kulonprogo	370.629	380.685	372.309	370.944	388.869	0,29	-0,22	-0,04	0,48
Bantul	568.618	634.442	696.905	781.013	911.503	1,21	0,94	1,19	1,57
Gunung Kidul	620.085	659.486	651.004	670.433	675.382	0,68	-0,13	0,3	0,07
Sleman	588.304	677.323	780.334	901.377	1.093.110	1,56	1,43	1,5	1,96
Yogyakarta	340.908	398.192	412.059	396.711	388.627	1,72	0,34	-0,39	-0,21
<b>DIY</b>	<b>2.488.544</b>	<b>2.750.128</b>	<b>2.912.611</b>	<b>3.120.478</b>	<b>3.457.491</b>	<b>1,10</b>	<b>0,58</b>	<b>0,72</b>	<b>1,04</b>

Sumber : Data Sensus Penduduk, BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil Susenas Agustus 2014 jumlah penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 3.666.533 jiwa dengan presentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 49,47 persen dan penduduk perempuan sebesar 50,53 persen. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 terhadap tahun 2010 mencapai 0,98 persen, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yakni 0,82 persen. Dengan luas wilayah 3.185,80  $km^2$ , kepadatan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 1.142 jiwa per  $km^2$ . Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 12.322 jiwa per  $km^2$  dengan luas wilayah hanya sekitar satu persen dari luas Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul yang memiliki wilayah terluas memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 470 jiwa per  $km^2$ .

**Tabel 4.3 Presentase Rumah Tangga dan Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014**

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kulonprogo	113.749	199.715	207.615	407.330
Bantul	278.339	489.809	492.575	982.384
Gunung Kidul	204.522	341.198	365.960	707.158

Sleman	374.645	584.985	577.426	1.162.412
Yogyakarta	139.157	198.075	209.174	407.249
<b>DIY</b>	<b>1.110.411</b>	<b>1.813.782</b>	<b>1.852.751</b>	<b>3.66.533</b>

Sumber : Susenas Agustus 2014, BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya, hal ini akan mempengaruhi jumlah angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan angkatan kerja memiliki persamaan dengan pertumbuhan penduduk, namun pertumbuhan ini menciptakan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja, sehingga tidak terjadi keseimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja dan mengakibatkan pengangguran. Jumlah penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) menurut kegiatan utama dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir terlihat bahwa jumlah penduduk berusia kerja meningkat dari 2,7 juta jiwa pada bulan Agustus 2010 menjadi 2,9 juta jiwa di bulan Februari 2015. Komposisi angkatan kerja berfluktuasi antara 68 sampai 73 persen, sementara kelompok bukan angkatan kerja berfluktuasi antara 27 sampai 32 persen.

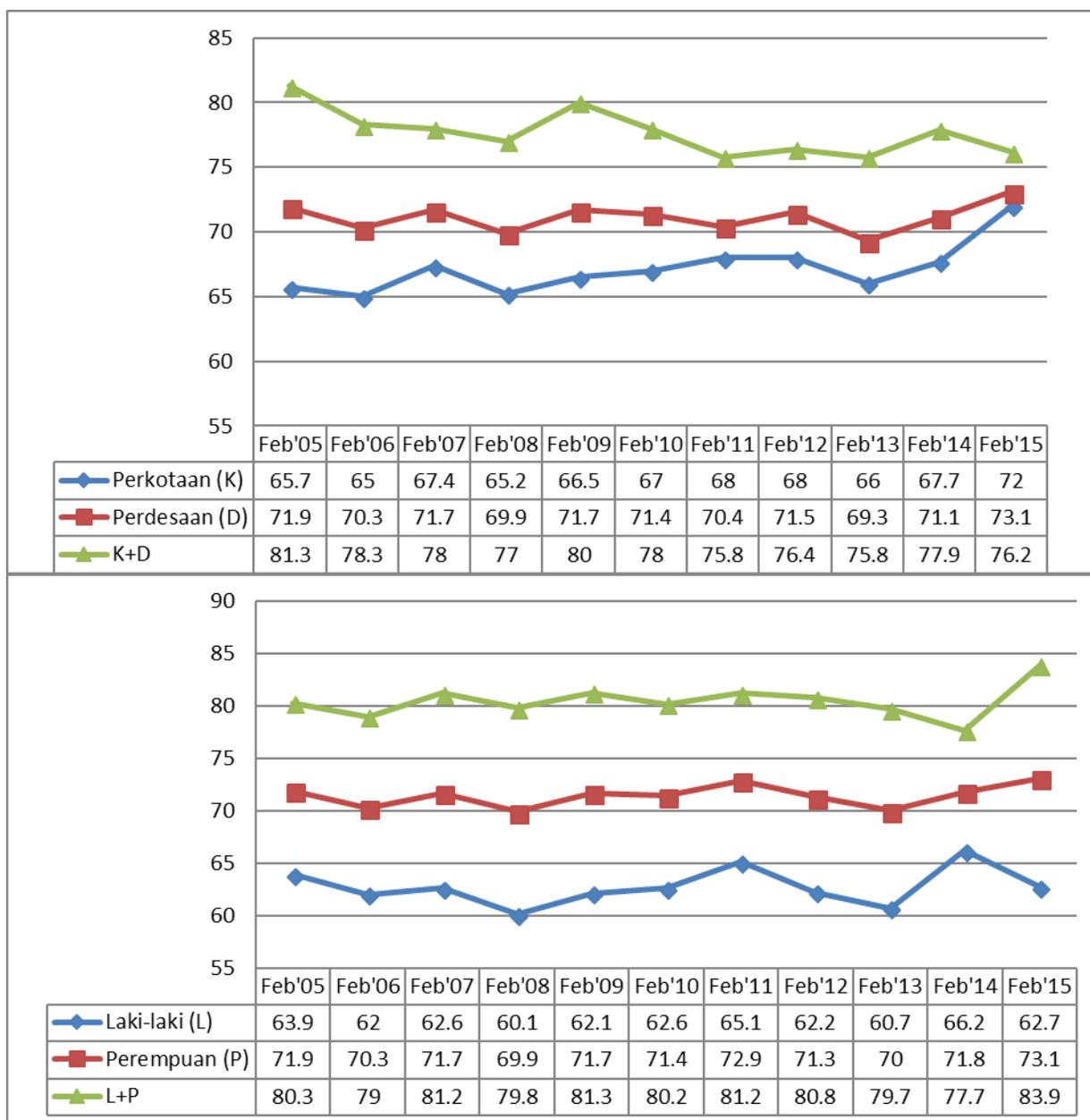
**Tabel 4.4 Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 – 2015 (Ribuan Jiwa)**

Kegiatan	2010	2011		2012		2013		2014		2015
	Agst	Feb								
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>1.882</b>	<b>1.991</b>	<b>1.934</b>	<b>1.970</b>	<b>1.989</b>	<b>1.958</b>	<b>1.949</b>	<b>2.033</b>	<b>2.023</b>	<b>2.098</b>
Bekerja	1.775	1.881	1.850	1.892	1.912	1.885	1.886	1.989	1.956	2.013
Pengangguran	107	110	83	78	77	73	63	44	67	85
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>816</b>	<b>739</b>	<b>814</b>	<b>793</b>	<b>792</b>	<b>839</b>	<b>864</b>	<b>797</b>	<b>824</b>	<b>772</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.698</b>	<b>2.730</b>	<b>2.747</b>	<b>2.764</b>	<b>2.780</b>	<b>2.797</b>	<b>2.813</b>	<b>2.830</b>	<b>2.848</b>	<b>2.870</b>
<b>TPAK (persen)</b>	<b>69,76</b>	<b>72,93</b>	<b>70,39</b>	<b>71,29</b>	<b>71,52</b>	<b>70,01</b>	<b>69,29</b>	<b>71,84</b>	<b>71,05</b>	<b>73,10</b>
<b>TPT (persen)</b>	<b>5,69</b>	<b>5,53</b>	<b>4,32</b>	<b>3,95</b>	<b>3,86</b>	<b>3,73</b>	<b>3,24</b>	<b>2,16</b>	<b>3,33</b>	<b>4,07</b>

Sumber : Sakernas, BPS Daerah Istimewa Yogyakarta

Pada bulan Februari 2015, jumlah angkatan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebanyak 2,1 juta jiwa sehingga tingkat partisipasi angkatan kerjanya sebesar 73,1 persen. Angka ini menggambarkan bagian dari penduduk berusia kerja yang terlibat aktif dalam

kegiatan perekonomian baik berstatus bekerja maupun sebagai pencari kerja atau penganggur. Pola perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa laki-laki lebih dominan dari perempuan. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki berfluktuasi pada kisaran 77 sampai 82 persen, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan berada pada kisaran 57 sampai 67 persen. Fenomena ini mengindikasikan bahwa keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini terjadi karena sebagian besar aktivitas mengurus rumah tangga dilakukan oleh perempuan dan adanya pandangan bahwa kewajiban untuk mencari nafkah adalah tanggung jawab laki-laki sehingga lebih sedikit perempuan yang masuk dalam angkatan kerja.



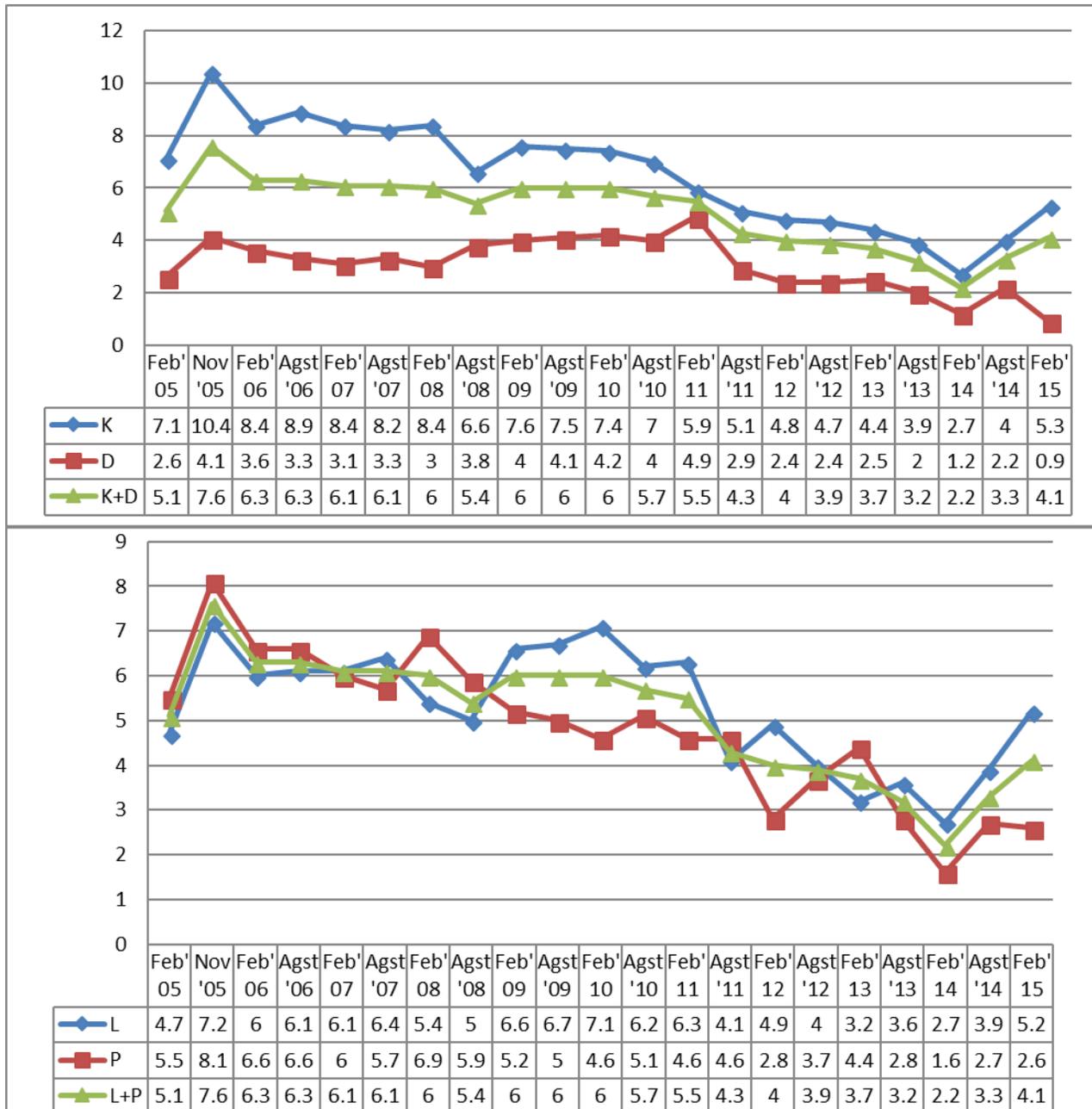
Sumber : Sakernas, BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**Gambar 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
menurut Jenis Kelamin dan Wilayah Tahun 2005 -2015 (Persen)**

Pola perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja menurut wilayah menunjukkan terdapat kecenderungan daerah perdesaan lebih tinggi dari daerah perkotaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perdesaan memiliki nilai yang berfluktuasi antara 73 sampai 82 persen, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja perkotaan berfluktuasi pada kisaran 62

sampai 72 persen. Fenomena ini berkaitan dengan adanya kecenderungan penduduk perkotaan yang lebih memilih menyelesaikan masa pendidikan sampai jenjang yang setinggi-tingginya sebelum memasuki pasar tenaga kerja serta lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai. Sementara, penduduk perdesaan memiliki lama bersekolah yang lebih singkat dan merasa sudah cukup untuk menyelesaikan jenjang pendidikan dasar atau menengah kemudian masuk pasar tenaga kerja untuk membantu ekonomi keluarga meski statusnya hanya sebagai pekerja keluarga dan bekerja di sektor informal dengan jumlah jam kerja yang relatif pendek. Keterlibatan perempuan di daerah perdesaan pada kegiatan sektor pertanian juga cukup masif, sementara perempuan di daerah perkotaan cenderung memilih untuk mengelola rumah tangga.

Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta selama Februari 2005 sampai dengan Februari 2015 mengalami fluktuasi pada kisaran 2,2 persen sampai 7,6 persen dan memiliki kecenderungan semakin menurun meskipun sedikit mengalami peningkatan pada bulan Februari 2015. Pada bulan Februari 2005, TPT Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 5,0 persen dan mengalami peningkatan pada bulan November sebesar 7,9 persen sebagai dampak dari kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak di tahun 2005. Kenaikan harga bahan bakar minyak memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara makro mengalami perlambatan dan berimbas pada tingginya tingkat pengangguran terbuka. Pada periode berikutnya, secara bertahap angka tingkat pengangguran terbuka semakin menurun hingga mencapai 2,2 persen di bulan Februari 2014 dan kembali meningkat menjadi 4,1 persen di bulan Februari 2015.



Sumber : Sakernas, BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**Gambar 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Daerah Istimewa Yogyakarta menurut  
Jenis Kelamin dan Wilayah Tahun 2005 -2014 (Persen)**

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka menurut wilayah perkotaan dan perdesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan pola yang hampir sama, namun terdapat kecenderungan tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan selalu tinggi

dibandingkan dengan daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di daerah perdesaan lebih mudah terserap dalam pasar kerja karena mereka pada umumnya akan menerima jenis pekerjaan apa saja termasuk di sektor informal maupun bekerja dengan status sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar meskipun pasar tenaga kerja di daerah relatif terbatas dengan struktur homogen pada sektor pertanian. Sedangkan angkatan kerja di daerah perkotaan cenderung lebih selektif dalam memilih lapangan usaha dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan maupun upah. Lamanya waktu dalam mencari jenis pekerjaan inilah yang mendorong tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan menjadi lebih tinggi. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi di daerah perkotaan terjadi pada bulan Agustus 2005 yang mencapai 10,37 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka tertinggi di daerah perdesaan terjadi di bulan Februari 2011 sebesar 4,90 persen. Tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan pada bulan Februari 2015 mengalami peningkatan sebesar 5,3 persen, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,9 persen.

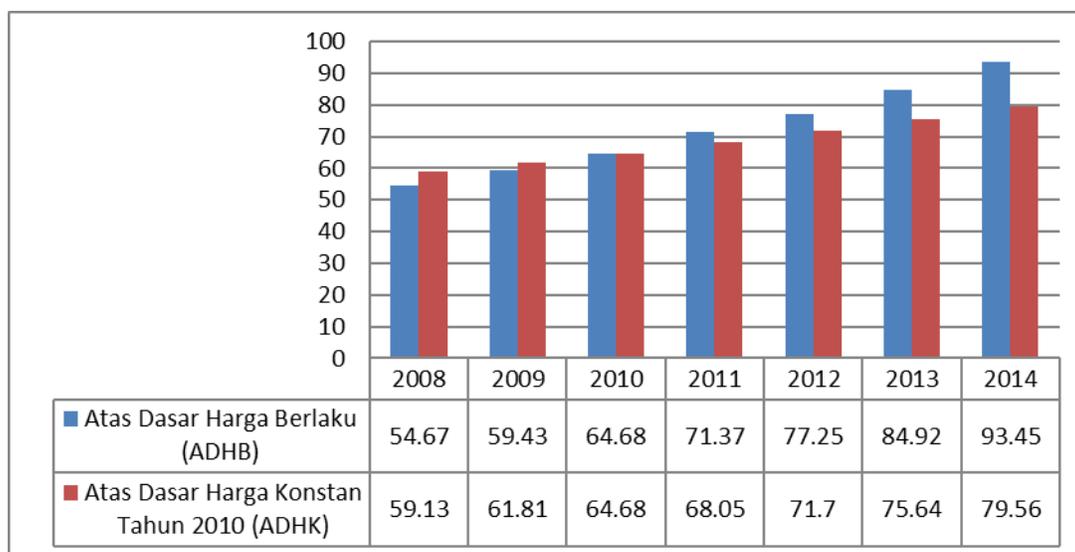
Perbandingan tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin tampak lebih dinamis dan polanya lebih berfluktuasi, meski secara umum keduanya terlihat memiliki kecenderungan yang semakin menurun. Mulai periode Februari 2005 sampai Agustus 2008 tingkat pengangguran terbuka penduduk perempuan tercatat lebih tinggi, namun pada periode Februari 2009 sampai Februari 2011 tingkat pengangguran terbuka pada penduduk laki-laki tercatat lebih tinggi. Pada kondisi Februari 2015, tingkat pengangguran terbuka laki-laki tercatat sebesar 5,2 persen dan tingkat pengangguran terbuka pada perempuan sebesar 2,6 persen.

### **3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah yang terbentuk dari keseluruhan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dengan rentang waktu tertentu. PDRB disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat melalui struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor ekonomi.

Pola perkembangan nilai PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Atas dasar harga pasar yang berlaku, PDRB meningkat secara bertahap dari Rp 54,7 triliun di tahun 2008 menjadi Rp 93,4 triliun di tahun 2014. Sementara, PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2010 meningkat secara bertahap dari Rp 59,1 triliun di tahun 2008 menjadi Rp 79,6 triliun di tahun 2014. Selama periode 2008 – 2014, kinerja perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta yang diukur dari pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh dengan rata-rata 5,1 persen per tahun.

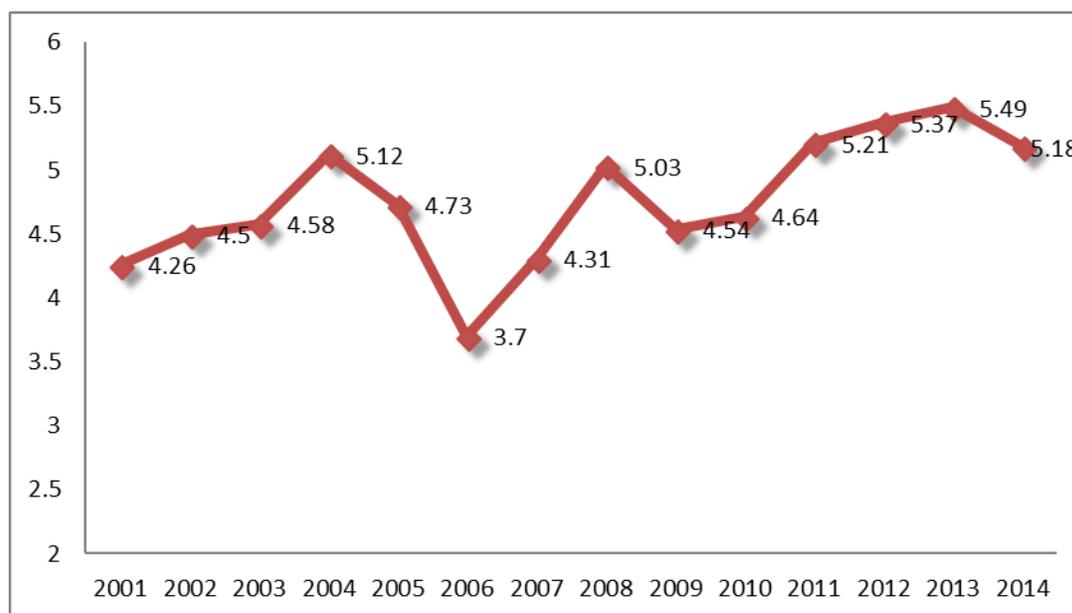
Laju pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2000 – 2014 memiliki pola yang berfluktuasi dengan level antara 3,7 persen sampai 5,5 persen. Setelah mengalami kontraksi yang berfluktuasi yang cukup dalam di tahun 1998 -1999, secara bertahap perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta mulai pulih dengan ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5,12 persen di tahun 2004. Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mengalami perlambatan dan hanya mampu tumbuh 3,7 persen di tahun 2006 sebagai imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak di tahun 2005 dan dampak bencana gempa bumi yang meanda Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Mei 2006. Selama tahun 2009 perekonomian juga mengalami perlambatan dari 5,03 persen menjadi 4,54 persen sebagai imbas dari krisis finansial yang melanda beberapa negara tujuan ekspor terutama Amerika Serikat dan Eropa.



Sumber : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**Gambar 4.4 PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2010, Tahun 2008 – 2014 (Rp Triliun)**

Selama tahun 2010 sampai 2013 perekonomian secara perlahan kembali membaik yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,5 persen. Angka ini menjadi pertumbuhan yang tertinggi yang mampu dicapai Daerah Istimewa Yogyakarta selama lebih dari satu dasawarsa terakhir, namun kembali melambat di tahun 2014 dengan laju sebesar 5,2 persen.



Sumber : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**Gambar 4.5 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2001 – 2014 (Persen)**

#### 4. Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan perbandingan antara harga suatu paket komoditas dari sekelompok barang atau jasa pada suatu periode waktu terhadap harga pada periode waktu yang telah ditentukan (tahun dasar). Berdasarkan IHK inilah kemudian didapat besaran angka inflasi atau deflasi, yaitu besarnya presentase perubahan IHK antar periode. Angka inflasi atau deflasi mencerminkan kemampuan daya beli dari uang yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah daya beli uang, sehingga semakin rendah pula daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa

untuk kebutuhan rumah tangga. IHK dihitung pada tingkat harga konsumen, yaitu harga transaksi yang terjadi antara penjual atau pedagang eceran dan pembeli secara eceran dengan pembayaran tunai.

Indeks Harga Konsumen mempunyai beberapa manfaat khususnya bagi para pengambil kebijakan baik secara makro maupun mikro. Beberapa kegunaan dari angka indeks harga konsumen dan inflasi secara singkat adalah sebagai berikut :

1. Inflasi adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memantau gejala perubahan harga di sector riil yang terjadi di masyarakat.
2. Digunakan sebagai indikator dalam penentuan kebijakan ekonomi secara makro.
3. Dasar penyesuaian atau perbaikan dalam menentukan tingkat upah.

Berikut adalah tabel Perkembangan Indeks Harga Konsumen Tahun 2010 – 2013 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

**Tabel 4.5 Indeks Harga Konsumen (IHK)  
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 -2013**

Tahun	IHK
2010	120,72
2011	127,78
2012	132,74
2013	145,65

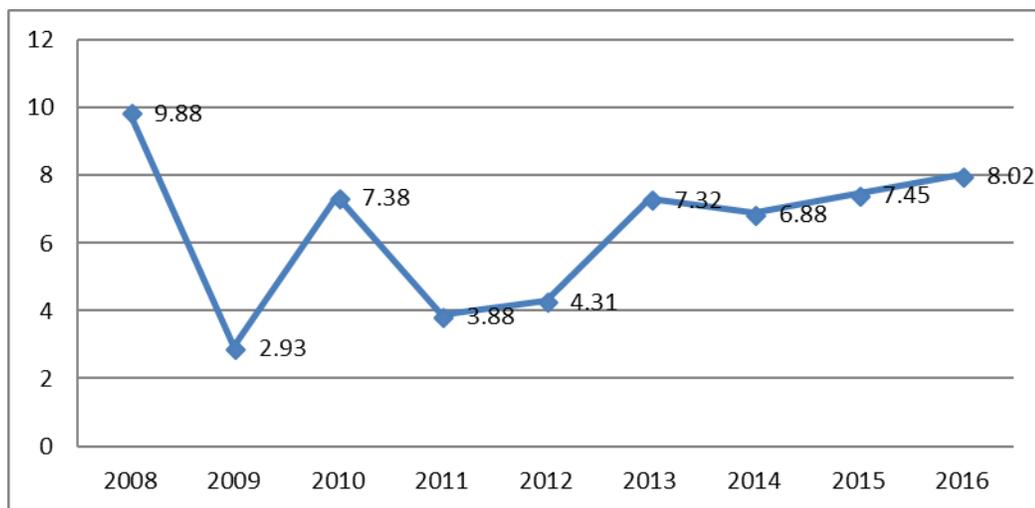
*Sumber : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*

Berdasarkan tabel diatas IHK Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 sebesar 120,72. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 127,78 hal ini diakibatkan oleh meningkatnya kelompok bahan makanan dan makanan jadi, pada tahun-tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan sebesar 132,74 pada tahun 2012 dan 145,65 pada tahun 2013.

## **5. Inflasi**

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika inflasi meningkat maka harga barang di dalam negeri mengalami kenaikan dan menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian inflasi

dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.



Sumber : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

**Gambar 4.6 Inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun 2008 -2016**

Inflasi pada tahun 2008 hingga 2013 dan proyeksi inflasi tahun 2014 hingga 2016 fluktuatif tetapi cenderung menurun. Salah satu faktor rendahnya inflasi adalah pengendalian moneter dan kebijakan Bank Indonesia (BI) yang efektif. Untuk inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 9,88 persen dan terendah terjadi pada tahun 2009 dengan tingkat inflasi hanya sebesar 2,93 persen. Tetapi dengan semakin majunya perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta maka kecenderungan terjadinya inflasi akan semakin besar, oleh karenanya inflasi masih harus terus dikendalikan karena akan dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

**Tabel 4.6 Proyeksi Inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun 2014 - 2016**

Tahun	2014		2015		2016	
	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat
Inflasi (%)	6,88	6,91	7,45	7,49	8,02	8,06

Sumber : BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diolah

Proyeksi inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan dari 7,45 pada tahun 2015 menjadi 8,02 pada tahun 2016. Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka pendapatan masyarakat cenderung naik dan kegiatan ekonomi juga akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan serta kegiatan di sektor moneter. Ketika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi Jumlah Uang Beredar (JUB) dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Tetapi jika terjadi sebaliknya tingkat bunga terlalu rendah sehingga orang cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya maka hal ini akan dapat mendorong terjadinya inflasi. Karena kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini hal tersebut telah dijalankan dengan baik oleh BI.

Di samping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran supply dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **6. Investasi**

Investasi merupakan pengorbanan materi dan non materi pada masa sekarang untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Menurut pelakunya investasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pemerintah, perusahaan (perusahaan yang difasilitasi dan tidak difasilitasi), serta rumah tangga. Data investasi perusahaan yang tersedia adalah rencana dan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang dilaporkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah).

Realisasi penanaman modal di Daerah Istimewa Yogyakarta secara kumulatif tahun 2014 mencapai Rp 9,5 triliun, dengan rincian PMDN mencapai Rp 3,6 triliun atau mencapai 75,6 persen dari investasi yang direncanakan pada tahun yang sama. Sementara, realisasi PMA mencapai nilai Rp 6 triliun atau mencapai 127,6 persen dari investasi yang direncanakan.

Berdasarkan sektornya, realisasi investasi baik PMDN maupun PMA sebagian besar terjadi pada sektor tersier dengan porsi 55,7 persen dan 70,4 persen.

**Tabel 4.7 Realisasi Kumulatif PMDN dan PMA  
Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Sektor Tahun 2013 (Milyar)**

Sektor	PMDN		PMA	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Primer	59 (1,26)	28 (0,77)	137 (2,93)	533 (8,95)
Sekunder	2.465 (52,20)	1.553 (43,52)	601 (12,87)	1.231 (20,66)
Tersier	2.198 (46,54)	1.988 (55,71)	3.931 (84,21)	4.192 (70,39)
Jumlah	4.722 (100)	3.569 (100)	4.668 (100)	5.956 (100)

*Sumber : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY*

Jumlah perusahaan yang melakukan penanaman modal dengan kategori PMDN tahun 2014 mencapai 128 perusahaan dan mampu menyerap pekerja domestik sebanyak 22.336 orang dan 17 orang tenaga kerja asing. Jika dibandingkan dengan nilai investasi yang direncanakan yang senilai Rp 4,7 triliun, maka realisasi pencapaian PMDN sampai tahun 2014 hanya sebesar 75,6 persen.

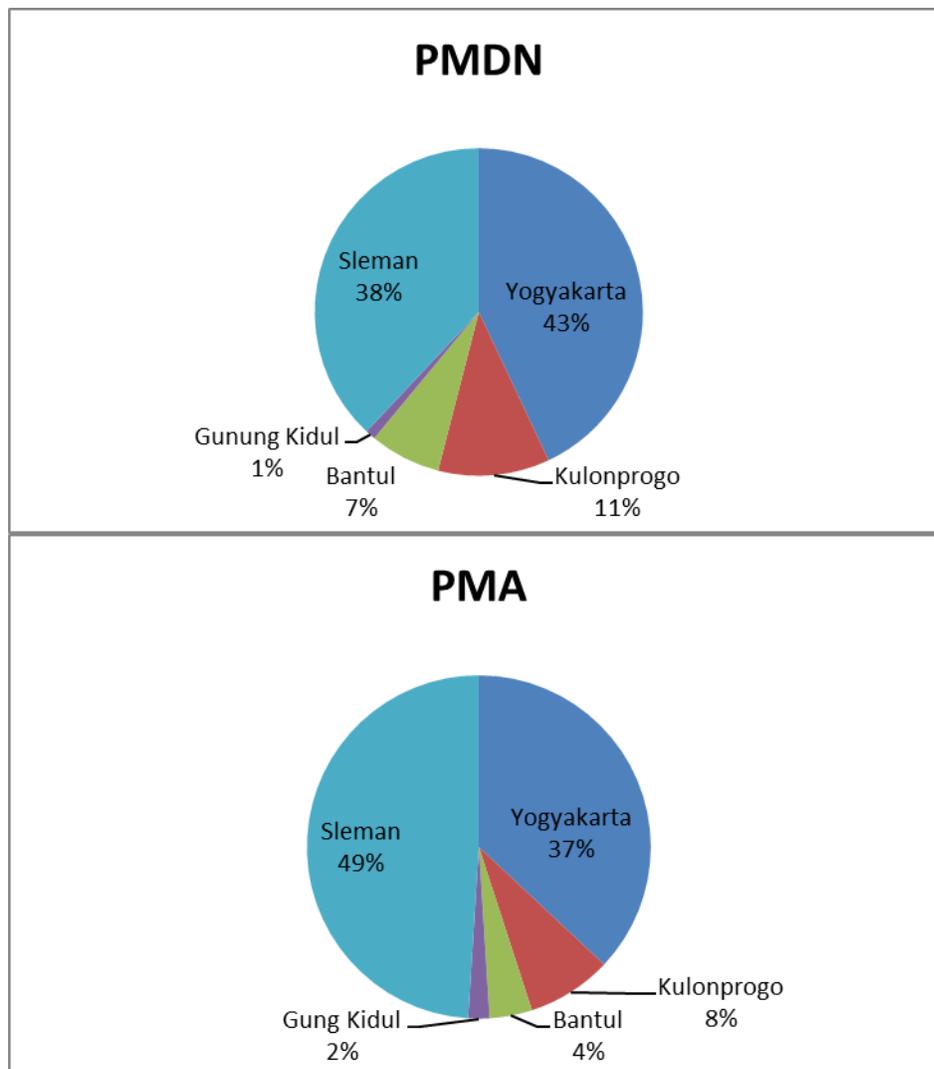
Berdasarkan kelompok sektor, realisasi PMDN terbesar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan pada kelompok sektor tersier dengan porsi sebesar 56 persen dari total realisasi PMDN. Kelompok sektor tersier terdiri dari kegiatan bangunan, hotel dan restoran, perdagangan, perumahan, pengangkutan, jasa lainnya, listrik, gas dan air minum. Sementara realisasi pada kelompok primer (pertanian dan pertambangan) porsinya hanya sebesar 0,8 persen. Investor domestik lebih berminat menanamkan modalnya di sektor hotel dan restoran dan diikuti oleh sektor industri tekstil dan jasa lainnya. Dalam skala nasional

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk salah satu daerah tujuan utama kegiatan pariwisata, sehingga cukup potensial untuk pengembangan kegiatan hotel dan restoran. Hal ini mendorong minat para investor domestik untuk berinvestasi pada sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Sementara, industri tekstil menjadi pendukung tumbuh pesatnya industri batik yang merupakan produk andalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama pasca penetapan batik sebagai karya seni tradisional Indonesia. Investasi jasa lainnya yang berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terutama terkait jasa pendukung perkembangan dunia pendidikan.

Realisasi kumulatif penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2014 mencapai Rp 5,9 triliun dan dilaksanakan oleh 122 perusahaan dengan serapan tenaga kerja domestik sebanyak 18.151 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 152 orang. Jika dibandingkan dengan perencanaannya, maka realisasi PMA selama tahun 2014 mencapai 128 persen artinya nilainya lebih sekitar 28 persen dari yang direncanakan. Distribusi realisasi PMA terbesar terjadi pada kelompok sektor tersier dengan porsi mencapai 70 persen. Sementara porsi kelompok sektor primer dan sekunder masing-masing sebesar 9 persen dan 20,7 persen. Sektor yang porsinya terbesar secara berturut-turut adalah sektor perdagangan dan reparasi, sektor hotel dan restoran, dan sektor industri makanan. Senada dengan investor dalam negeri, investor asing juga lebih berminat untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang berbasis pariwisata. Kinerja pariwisata yang terus menunjukkan peningkatan dari sisi jumlah kunjungan menjadi daya tarik untuk berinvestasi di sektor tersebut. Fakta ini menjadi sebuah persoalan, karena pada umumnya investasi sektor pariwisata terpusat di daerah perkotaan sehingga membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengalihkan investasi ke daerah pinggiran perdesaan.

Berdasarkan lokasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun 2014, realisasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki nilai yang terbesar dengan porsi mencapai 43 persen dan 38 persen. Sementara, realisasi di Kabupaten Kulonprogo memiliki porsi sebesar 11 persen dan lebih tinggi dari Bantul yang sebesar 7 persen. Bahkan, realisasi di Kabupaten Gunung Kidul hanya memiliki porsi 1 persen. Pola yang hampir serupa terjadi pada penanaman modal asing (PMA). Realisasi terbesar dicapai Kabupaten Sleman sebesar 49 persen dan Kota Yogyakarta sebesar 37 persen, diikuti oleh Kabupaten Kulonprogo yang

mencapai 8 persen. Peningkatan pangsa investasi kumulatif PMDN dan PMA yang cukup nyata terjadi di Kabupaten Kulonprogo berkaitan dengan aktivitas pertambangan biji besi dan rencana pembangunan kawasan bandara terpadu yang berlokasi di Kulonprogo.



Sumber : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY

**Gambar 4.7 Realisasi PMDN dan PMA Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 (Persen)**